

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam melakukan perhitungan atau analisis realisasi pajak bumi dan bangunan Tahun 2016 sampai dengan 2020 pada Badan Pendapatan Daerah Bojonegoro, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan PBB-P2 sudah bisa mencapai target yang ditetapkan kecuali pada tahun 2016. Rata-rata efektivitas penerimaan PBB-P2 mencapai 105,664% dimana jika diukur berdasarkan kriteria efektivitas termasuk kedalam kategori sangat efektif. Dilihat dari klasifikasi kriteria kontribusi, pajak bumi dan bangunan di tahun 2016 sampai 2020 memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Bojonegoro dibandingkan pajak daerah lain, dimana rata rata kontribusi pajak bumi dan bangunan bagi pendapatan daerah kota Bojonegoro menduduki urutan kedua setelah pajak penerangan jalan.
2. Kelalaian dan kurangnya kesadaran wajib pajak menjadi salah satu factor eksternal yang mengakibatkan kurang maksimalnya penerimaan pajak di Kota Bojonegoro. Sedangkan salah satu factor internal dari tidak terealisasinya target pajak adalah kurangnya kemampuan dibidang IT dikalangan karyawan pemungut.

## 5.2. Saran dan Implikasi Penelitian

Adapun beberapa saran untuk penelitian selanjutnya bagi peneliti yang tertarik meneliti tentang penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah:

1. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber untuk dijadikan referensi yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan agar hasil penelitiannya dapat lebih baik lagi.
3. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat lebih membahas makna angka dalam penelitian.

Adapun beberapa masukan untuk pemerintah Kota Bojonegoro dalam upaya penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dipertahankan dan ditingkatkan, antara lain:

1. Diharapkan pemerintah Bojonegoro dapat meningkatkan kemampuan berbasis IT.
2. Perlunya penambahan jumlah personil lapangan sebagai pengawas untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan pajak.

Diharapkan untuk tahun selanjutnya pemerintah Bojonegoro dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Bojonegoro.

## DAFTAR PUSTAKA

- AD, F. (2021, 1 27). *appon*. Diunduh dari <https://www.jojonomic.com/blog/pajak-bumi-bangunan/>
- APBD - Online Bojonegoro. (2020). Diunduh dari <http://apbd.bpkad.id/apbd.php/tabel/data/2020/5>
- BADAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO. (2021). Diunduh dari <http://bapendabojonegoro.id/pendapatan-unggulan/>
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro*. (2020). Diunduh dari <http://bapendabojonegoro.id/pbb-pedesaan-dan-perkotaan-p2/>
- Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327*. (2006).
- Dr. Kautsar R. Salman, S. M. (2019). *MODUL MATA KULIAH PENGANTAR PERPAJAKAN*. Surabaya.
- Kemenpan. (2017). *Sipp Kemenpan RB*. Diunduh dari <https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/sekretariat-daerah-provinsi-jawa-timur-/pemerintah-kab-bojonegoro/badan-pendapatan-daerah>
- Maulida, R. (2018, Oktober 3). *OnilePajak*. Diunduh dari OnlinePajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-bumi-dan-bangunan>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2007). PERATURAN METERI KEUANGAN NOMOR 03/PMK.07/2007.
- Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. (2015). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- PT. All Property Media. (2018, Juli 5). *PT. All Property Media*. Diunduh dari rumah.com: <https://www.rumah.com/panduan-properti/apa-itu-njop-dan-njop-9143>
- PT. All Property Media. (2019, Juni 1). *rumah.com*. Diunduh dari [https://www.rumah.com/panduan-properti/cara-tepat-menghitung-pbb-pajak-bumi-dan-bangunan-15318#:~:text=Begini%20rumus%20penghitungan%20PBB%20\(Pajak,untuk%20perhitungan%20PBB%20%3D%20NJOP%20%E2%80%93%20NJOPTKP](https://www.rumah.com/panduan-properti/cara-tepat-menghitung-pbb-pajak-bumi-dan-bangunan-15318#:~:text=Begini%20rumus%20penghitungan%20PBB%20(Pajak,untuk%20perhitungan%20PBB%20%3D%20NJOP%20%E2%80%93%20NJOPTKP)
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No.28 Tahun 2009.

*Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perorangan.* (2015). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Utari, F. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan. 29.

